

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Revolusi perkembangan teknologi dan informasi komunikasi (TIK) telah menyebabkan berbagai pergeseran bahkan lompatan dalam pengelolaan pengembangan perpustakaan yang semakin berorientasi pada pemenuhan tuntutan kebutuhan pengguna. Adopsi teknologi perpustakaan digital dengan konektivitasnya pada sumberdaya global melalui teknologi jaringan menyediakan peluang bagi pengguna untuk memperoleh jangkauan akses yang lebih luas. Perpustakaan digital secara teknologinya telah membebaskan pengguna dari keterikatan ruang maupun waktu dalam mengakses informasi, seperti yang selama ini dialami di perpustakaan konvensional. Tetapi perpustakaan digital juga yang mengikat dan mempersempit jangkauan akses dengan membatasi pemencaran informasi. Potensi perpustakaan digital untuk mewujudkan jalinan kerjasama dan saling berbagi pakai sumberdaya seakan dibelenggu.

Salah-seorang penggagas dan pelaku kerjasama dan jaringan perpustakaan digital menyampaikan pemikirannya tentang isu kerjasama ini sebagai berikut:

”... Ya mereka benar juga sih, mengapa saya harus berbagi (informasi), kalau saya tidak mendapatkan untung apa-apa (dengan berbagi). Tapi sebenarnya meskipun kita bagi-bagi kan kita tetap punya, ngak ada ruginya...” (wawancara dengan Luki Wijayanti, 5 September 2007).

Pendapat ini paling tidak merefleksikan 4 konsep yang terdapat di dalam kerjasama dan jaringan perpustakaan. Pertama, informasi dan karakteristiknya. Kedua, pustakawan. Ketiga, konsep saling berbagi. Keempat, keuntungan kerjasama. Keempat konsep ini dapat ditanggapi secara positif tetapi sekaligus juga negatif. Mereka yang pesimistis memprediksikan bahwa kerjasama dan jaringan perpustakaan masih memerlukan jalan panjang untuk mencapai terwujudnya kelanggengan berjejaring sekalipun inovasi teknologi dan

aplikasinya semakin menopang untuk itu. Mereka yang optimistis akan menduga sebaliknya.

Fenomena sebagaimana dikemukakan di atas beserta dengan beberapa pokok bahasan di bawah ini dipaparkan dengan maksud untuk menyampaikan dasar pemikiran peneliti memilih kapasitas perpustakaan digital di lingkungan Universitas Indonesia sebagai salah-satu pemenang Program Hibah Kompetisi Indonesian Higher Education Network (INHERENT) pada tahun 2006 sebagai topik untuk diteliti. Pokok-pokok bahasan dimaksud adalah: pergeseran fungsi otomasi perpustakaan, kerjasama dan jaringan perpustakaan PT di Indonesia, intervensi pemangku kepentingan (*stakeholders*), Program Hibah Kompetisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (PHK TIK), dan PHK INHERENT.

1.1.1. Pergeseran Fungsi Otomasi Perpustakaan

Menurut Borgman (2000), fungsi otomasi perpustakaan telah berada pada tahap akses terhadap sumberdaya di luar perpustakaannya sendiri (Kochtanek dan Matthews, 2002, p. 6). Aplikasi TIK di perpustakaan semakin difokuskan kepada *content* informasi serta pemenuhan kebutuhan *end user* dalam mengakses informasi. Informasi harus dapat diakses kapanpun, dari manapun, dan ke manapun; dalam format apapun, cetak maupun digital. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan serupa ini, maka otomasi perpustakaan mengembangkan dirinya kepada perpustakaan hibrida dan atau perpustakaan digital.

Konsep akses informasi dalam konteks infrastruktur informasi harus mengandung 3 elemen penting, yaitu: konektivitas, *content* dan layanan, serta kebergunaan atau keterpakaian (*usability*). Konektivitas merupakan prasyarat agar jaringan komputer beserta dengan sumberdaya dan layanan yang ditopangnya dapat digunakan. *Content* dan layanan berhubungan dengan segala sesuatu yang disediakan dan dijalankan di dalam infrastruktur informasi. Konsep kebergunaan terdiri dari 3 aspek, yaitu: pertama, penggunaan jaringan komputer atau infrastruktur itu sendiri. Aspek kedua, seperangkat ketrampilan atau *literacy* pengguna terhadap sistem. Aspek ketiga, *content* yang dapat digunakan artinya informasi yang diperoleh harus dapat dibuka untuk dibaca (Borgman, 2000, p. 56 – 57). Didalam pusran akses informasi serupa inilah teknologi perpustakaan

digital selayaknya memfasilitasi terwujudnya kerjasama dan jaringan perpustakaan.

Kemampuan teknologi serupa di atas telah memengaruhi kegiatan perpustakaan sebagai suatu entitas sistem sosial yang berujung kepada kenyamanan pengguna. Pengaruh ini meliputi bentuk-bentuk: *automating*, *informing*, dan *transforming*. Artinya, kegiatan yang dilakukan perpustakaan meningkat efisiensinya mencapai tingkat kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan manual, proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah sementara konsep akses ke informasi yang dimiliki berubah kepada konsep tanpa harus memiliki tetapi jangkauan aksesnya semakin luas (Rahardjo, 1995, p. 1 - 3). Permasalahannya adalah: bagaimanakah dan ke manakah pustakawan akan memberdayakan perpustakaan digital melalui diri mereka.

1.1.2. Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia

Tersedianya *content* dan layanan yang dijalankan di dalam infrastruktur informasi bukan masalah teknologi semata tetapi juga masalah sumberdaya manusia, dalam hal ini kesiapan dan komitmen pustakawan pada setiap perpustakaan digital untuk mau saling bekerjasama dan saling berbagi sumberdaya informasi. Selama ini, kajian terhadap kerjasama dan jaringan perpustakaan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia menghasilkan temuan yang bermuara pada kesimpulan gagalnya berbagai kerjasama untuk berkembang dan berumur panjang. Kegagalan terjadi baik pada kerjasama dan jaringan yang pernah dibentuk mulai pada tahun 1976, seperti Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Bagian Timur (BKS PTN INTIM), ataupun yang dibentuk setelah tahun tersebut, seperti Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Barat (BKS PTN B) maupun kerjasama dan jaringan yang kemudian tumbuh secara sporadis (Permadi, 1998, p. 17; Sulisty-Basuki, 1992, p. 32 – 38).

Buruknya kinerja jaringan seperti yang dikemukakan sebelum ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, faktor yang melekat pada perpustakaan itu sendiri, seperti misalnya: dana pengembangan koleksi yang tidak memadai, yang akhirnya membebani perpustakaan anggota yang besar untuk memenuhi

kebutuhan permintaan anggota (*nodes*) yang lain. Pemenuhan kebutuhan sering harus mengandalkan sumberdaya asing sehingga layanan menjadi sangat mahal dan kecepatannya juga lambat.

Kedua, manajemen jaringan perpustakaan. Jaringan perpustakaan biasanya dibangun atas dasar kesukarelaan. Akibatnya, sulit menjatuhkan sanksi pada anggota yang gagal melakukan fungsi yang diharapkan. Jaringan yang dibangun dengan kesepakatan formal, anggotanya terkadang tidak bersetuju dengan fungsi tertentu dikarenakan oleh sejumlah alasan. Alasan ini sering berhubungan dengan kebijakan dan tujuan lembaga induk yang menaungi perpustakaan anggota tersebut.

Ketiga, penguasaan terhadap teknologi yang diadopsi. Kurangnya penguasaan terhadap teknologi mengakibatkan fungsi yang diharapkan tidak dapat dilakukan. Misalnya saja implementasi format standar untuk suatu sistem pangkalan data bibliografi (Permadi, 1998, p. 18).

Perpustakaan PT secara umum tidak melakukan upaya untuk berbagi sumberdaya informasi. Rendahnya pendayagunaan bahan perpustakaan di perpustakaan PT menyebabkan rendahnya juga kerjasama antar perpustakaan PT sehingga tidak diperlukan adanya kerjasama (Sulistyo-Basuki, 1992, p. 46; 2003, p. 15; 2004, p. 198 - 200).

Dalam perkembangannya kemudian, revolusi perkembangan TIK maupun berbagai sistem aplikasinya, termasuk untuk perpustakaan, telah mendorong perpustakaan PT, khususnya, untuk mengadopsi teknologi media baru ini_ yakni komputer dan koneksinya ke internet. Potensi teknologi yang diadopsi ini kembali memicu minat pustakawannya untuk membangun lagi kerjasama dan jaringan perpustakaan. Mirip dengan kerjasama dan jaringan perpustakaan yang pernah dibentuk secara nasional maupun yang tumbuh secara sporadis sejak tahun 1976, sebagaimana telah dipaparkan terdahulu, kemudian mulai tahun 1998 perpustakaan PT kembali membangun kerjasama dan jaringan perpustakaan mereka.

Beberapa penggagas serta pelaku kerjasama dan jaringan perpustakaan digital PT di Indonesia ini, seperti antara lain: Indonesian Christian University Virtual Library (InCU-VL) yang dibentuk tahun 1998, dan Indonesian Higher

Education Network (INHERENT) yang dirintis tahun 2004, mengungkapkan pendapat yang merefleksikan beragam perspektif terhadap eksistensi kerjasama dan jaringan. "... filsafat lidi harus diadopsi sebagai filsafat bersama untuk bekerjasama dalam jaringan. Sendiri kita lemah, tetapi bersama kita kuat." (wawancara dengan Henny Linggawati, 11 Maret 2002). Penggagas serta pelaku kerjasama dan jaringan perpustakaan yang lain berpendapat seperti yang telah dikemukakan di awal bab ini.

1.1.3. Intervensi Pemangku kepentingan

Sejarah panjang kerjasama dan jaringan perpustakaan PT di Indonesia memperlihatkan bahwa khususnya dalam hal pendanaan untuk mengimplementasikan TIK sebagai sarana kerjasama tampak tidak lepas dari intervensi pemangku kepentingan. Berbagai sumber menyebutkan bahwa dana pada umumnya diperoleh melalui berbagai lembaga sponsor, baik lokal (pemerintah dan atau lembaga swasta) maupun lembaga sponsor regional bahkan internasional yang masuk lewat mekanisme independen ataupun antar pemerintah (*Government to Government {G to G}*) (Fahmi, 2002, p. 153 - 155; Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006, p. 1; Linggawati, 2002; Sulistyobasuki, 1992, p. 34 - 35; Sulistyobasuki, 1996, p. 2; Sulistyobasuki, 2004, p. 195).

Tahun 2006 Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI) memfasilitasi institusi pendidikan tinggi dengan meluncurkan beberapa Program Hibah Kompetisi (PHK) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah-satu PHK yang diluncurkan adalah program pengembangan sistem dan jaringan informasi pendidikan tinggi yang dilakukan secara bertahap dan direncanakan mulai pertengahan 2006 akan menghubungkan perguruan tinggi (PT) di seluruh Indonesia (Indonesian Higher Education Network - INHERENT) secara intranet.

1.1.4. Program Hibah Kompetisi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ditjen DIKTI di dalam *Higher Education Long Term Strategy (HELTS)* 2003 - 2010 meletakkan salah-satu kebijakan dasar pengembangan pendidikan tinggi pada akses yang lentur terhadap pengetahuan. Kelenturan akses pengetahuan, salah-satunya diterapkan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan *electronic learning (e-learning)* khususnya, akan dapat meningkatkan daya saing bangsa (Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003, p. 9).

Agar terwujud kondisi akses pengetahuan seperti dimaksudkan di atas, maka mulai tahun 2006 Ditjen DIKTI memfasilitasi institusi pendidikan tinggi dengan meluncurkan beberapa PHK TIK. PHK adalah suatu program pengembangan sistem dan jaringan informasi pendidikan tinggi, sebagai upaya PT dalam mengembangkan kapasitas institusional, yang diusulkan kepada Ditjen DIKTI untuk didanai melalui proses kompetisi.

1.1.5. Program Hibah Kompetisi INHERENT

PHK yang diluncurkan pada tahun 2006, salah-satunya adalah PHK K-1, PHK K-2, dan PHK K-3. Ketiga jenis PHK ini juga dikenal sebagai PHK INHERENT, karena program yang dikembangkannya merupakan program dan atau *content* yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat PT yang terhubung dengan sistem jaringan infrastruktur INHERENT secara intranet.

Awalnya target *content* yang akan dijalankan pada jaringan ini adalah modul lengkap bahan ajar. Tetapi karena masih terjadi hambatan non-teknis untuk menjalankan *course content* ini di INHERENT, maka kemudian peluang ini digunakan untuk perpustakaan digital (wawancara dengan Luki Wijayanti, 6 Februari 2008).

PHK K-1 merupakan program hibah yang ditawarkan untuk diikuti oleh 9 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dipandang sudah memiliki sumberdaya TIK yang memadai. Kesembilan PTN ini adalah: Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Sumatera

Universitas Indonesia

Utara. Simpul lokal INHERENT kelak akan ditetapkan dari antara mereka. Sementara itu PHK K-2 diperuntukkan bagi PTN yang lain, sedangkan PHK K-3 untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Setiap PTN maupun PTS ini kelak akan berfungsi sebagai bukan simpul lokal.

1.2. Perumusan Masalah

Uraian di atas memperlihatkan bahwasanya adopsi teknologi perpustakaan digital mendorong terbentuknya kerjasama dan jaringan perpustakaan serta sekaligus memelihara keberlangsungannya. Dalam konteks ini maka kajian perpustakaan digital bukan hanya menyediakan infrastruktur teknologi dan sistem perpustakaan digital yang keduanya sarat dengan dimensi teknologi. Tetapi peneliti mencermati bahwasanya perpustakaan digital juga memiliki dimensi sosial, yakni segala sesuatu yang bersentuhan dengan aset manusia, aset lingkungan dan aset sosial.

Kajian ini, oleh sebab itu akan difokuskan pada perpustakaan digital yang mendorong terwujudnya kerjasama dan jaringan perpustakaan. Oleh karena kerjasama melibatkan staf yang ada di dalam setiap perpustakaan digital, maka unsur sumberdaya manusia, dalam hal ini pustakawan bersama dengan teknologi yang diadopsinya dan kapasitas manajemen sebagai bagian dari kapasitas perpustakaan digital dipilih untuk sub-fokusnya. Penelitian ini dengan demikian akan mencoba memahami tindakan pustakawan dalam berinteraksi dengan teknologi perpustakaan digital.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah diungkapkan dalam uraian terdahulu, maka pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kondisi kapasitas perpustakaan digital di lingkungan UI?
- b. Bagaimanakah peran kondisi kapasitas perpustakaan digital dalam mengembangkan kerjasama dan jaringan perpustakaan digital PT pada aras meso (UI)?

- c. Bagaimanakah peran kondisi kapasitas perpustakaan digital dalam mengembangkan kerjasama dan jaringan perpustakaan digital PT pada aras makro (nasional) yang difasilitasi INHERENT?

1.4. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat:

- a. Menjelaskan kondisi kapasitas perpustakaan digital di lingkungan UI.
- b. Menjelaskan peran kondisi kapasitas perpustakaan digital dalam mengembangkan kerjasama dan jaringan perpustakaan digital PT di aras meso (UI).
- c. Menjelaskan peran kondisi kapasitas perpustakaan digital dalam mengembangkan kerjasama dan jaringan perpustakaan digital PT di aras makro (nasional) yang difasilitasi INHERENT.

1.4.2. Signifikansi Penelitian

- a. Penelitian ini belum pernah ada yang melakukan, terutama dalam kaitannya dengan kerjasama dan jaringan perpustakaan digital pada pendidikan tinggi di aras nasional yang sedang terus disempurnakan dan ditopang oleh DIKTI.
- b. Menjadi usulan penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi perpustakaan digital pada PT khususnya, yang mengalami permasalahan serupa.
- c. Menjadi sumbangan awal secara teoritis tentang kapasitas perpustakaan digital yang dijalankan di dalam sistem infrastruktur nasional.
- d. Bermanfaat bagi saya maupun mereka yang bekerja di perpustakaan PT yang sedang menuju kepada perpustakaan digital, dan bagi pihak-pihak lain yang menaruh minat pada kajian sosial perpustakaan digital.

1.5. Tinjauan Literatur

Pokok persoalan seperti yang sudah diungkapkan di muka, telah menuntun peneliti kepada berbagai literatur di dalam bidang sistem informasi. Jones dan Karsten (2003) mengidentifikasi ada 225 artikel sistem informasi yang diterbitkan di dalam jurnal terkemuka dan konferensi antara tahun 1986 – 2002 yang menggunakan Teori Strukturasi-nya Anthony Giddens (Jones & Karsten, 2003, p. 3). Model Teknologi Strukturasi Orlikowski (Orlikowski dan Robey, 1989; Orlikowski, 1992) dan Teori Strukturasi Adaptif (*Adaptive Structuration Theory* = *AST*) (DeSanctis dan Poole, 1994; Poole dan DeSanctis, 1990, 1992) yang merupakan 2 buah teori perluasan yang penting dari Teori Strukturasi juga termasuk didalamnya (p. 19 – 20).

Meskipun bukan dalam konteks perpustakaan digital, dapat disebutkan secara spesifik beberapa kajian sistem informasi yang meneliti interaksi antara staf dengan TIK yang diimplementasi pada suatu organisasi yang juga menggunakan Teori Strukturasi dan atau *AST*. Penelitian dilakukan oleh LeRouge & Webb, 2004; Montealegre, 1997; Orlikowski & Robey, 1991; dan Pendit, 2005. Montealegre menggunakan Teori Strukturasi-nya Giddens (1984) untuk menganalisa bagaimana aturan dan sumberdaya struktural di dalam konteks lingkungan, keorganisasian dan TIK memengaruhi dan dipengaruhi oleh proses implementasi TIK (Montealegre, 1997, p. 106). Teori strukturasi juga digunakan oleh Orlikowski dan Robey pada kerangka kerja teori yang mereka rekonstruksi. Kerangka kerja ini dapat digunakan untuk memandu kajian di dalam dua bidang utama penelitian sistem informasi, yakni: pengembangan sistem dan konsekuensi keorganisasian dalam menggunakan TIK (Orlikowski & Robey, 1991, p. 143).

LeRouge dan Webb (2004) menggunakan *Adaptive Structuration Theory* (*AST*), teori aplikasi yang dibangun oleh Gerardine DeSanctis & Marshall Scott Poole (1994) berdasarkan Teori Strukturasi, untuk mengembangkan model adopsi teknologi dengan mengenali peluang perubahan pada pola apropriasi. Apropriasi ditujukan terhadap sistem paket program *Enterprise Resource Planning* (*ERP*) yang diimplementasikan pada dunia pendidikan, yakni Institut Bisnis (LeRouge & Webb, 2004, p. 316). Pendit (2005a) menggunakan *AST* untuk memahami penggunaan Jaringan Universitas Indonesia Terpadu (*JUITA*) didalam

penelitiannya yang bertujuan untuk mengkaji kemunculan dan perkembangan sebuah komunitas peneliti yang memanfaatkan jaringan berbasis teknologi telematika, dikenal dengan istilah komunitas *cyber* atau komunitas maya (Pendit, 2005a, p. ii & 8).

Faraj, Kwon, dan Watts (2004) menyebutkan didalam penelitian mereka bahwa teori stukturasi diadopsi oleh beberapa peneliti untuk menjelaskan proses bolak-balik dari *sensemaking*, negosiasi dan adaptasi yang menyertai adopsi teknologi pada organisasi (Barley, 1986; Griffith, 1999; Orlikowski, 1992, 2000). Menurut Monteiro dan Hanseth (1995), pendekatan strukturasi paling efektif dalam menjelaskan proses adaptasi yang secara tak terelakkan menyertai diperkenalkannya teknologi baru ke dalam tatanan sosial pada suatu organisasi (dalam Faraj, Kwon, & Watts, 2004, p. 188).

1.6. Kerangka Pemikiran

Bila mencermati kondisi perkembangan kerjasama dan jaringan informasi perpustakaan PT sebagaimana yang terwujud hingga saat ini, maka peneliti menduga teknologi perpustakaan digital tidak diadopsi secara holistik. Perpustakaan mengadopsi teknologi ini hanya sebatas teknologi sebagai seperangkat infrastruktur dan sistem perpustakaan digital, sementara dimensi sosial yang juga melekat pada teknologi ini telah kita abaikan. Akibatnya adopsi teknologi perpustakaan digital tidak secara langsung mendorong terwujudnya kerjasama dan jaringan perpustakaan.

Dimensi sosial teknologi perpustakaan digital sangat erat bersentuhan dengan faktor sumberdaya manusia sebagai pelaku atau aktor, dalam hal ini pustakawan dengan lingkungannya. Di dalam lingkungan internalnya pustakawan bergerak dalam lingkup organisasi dimana mereka melakukan aktivitas kepustakawannya. Mereka dapat melakukan tindakan secara individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam mengambil keputusan untuk bertindak ini mereka dipengaruhi dan atau dibatasi oleh sumberdaya lain yang tersedia di dalam organisasi maupun oleh lingkungan di luarnya. Lingkungan eksternal ini adalah lembaga induk yang menaungi perpustakaan digital dan lingkungan sosialnya, yaitu: pemangku kepentingan yang lain, mulai dari komunitas pengguna,

perpustakaan lain, perusahaan pengembang perangkat lunak, pemasok bahan-bahan digital, hingga sponsor penopang dana, dan seterusnya.

Pustakawan mampu bertindak karena ada kapasitas pada dirinya yang memampukannya mempertimbangkan berbagai alternatif, memilih untuk kemudian memutuskan dan melakukan tindakan tertentu dalam berinteraksi dengan teknologi yang diadopsi perpustakaan. Setiap tindakan dalam berinteraksi akan memberikan hasil tertentu dan mungkin juga pengaruh yang tidak diharapkan. Pengaruh yang tidak diharapkan ini sejauh dalam jangkauan kontrol pustakawan pada gilirannya akan mereproduksi interaksi baru antara pustakawan dengan teknologi sebagai praktek sosial di dalam sistem sosial perpustakaan digital sehingga sistem informasi dapat terus dikembangkan.

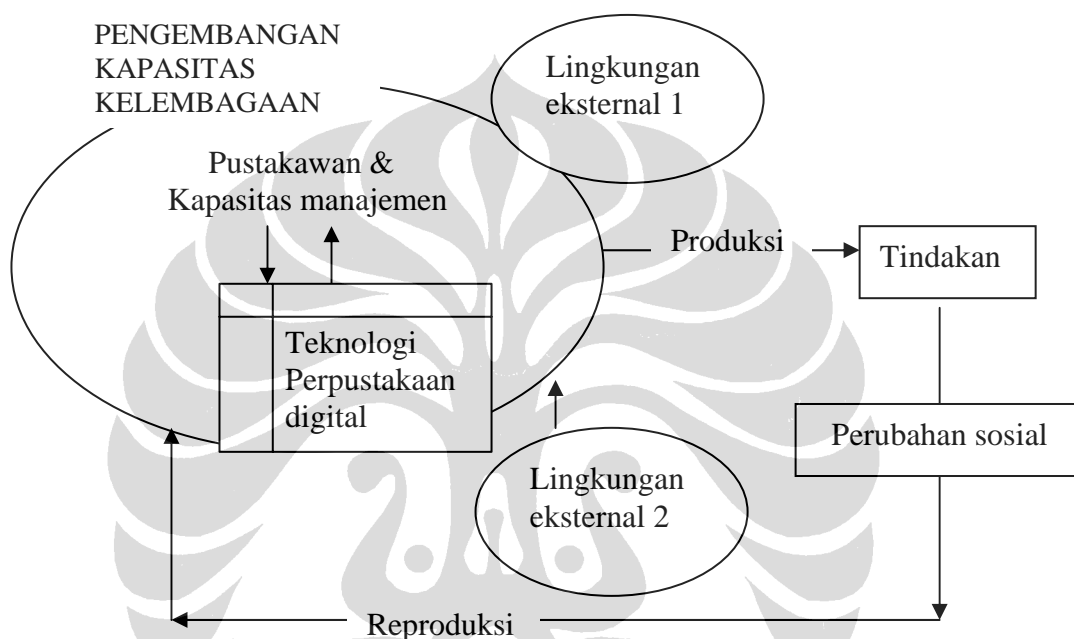
Hasil sebagai luaran dari adopsi terhadap teknologi perpustakaan digital sangat dipengaruhi oleh apa dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pustakawan dalam berinteraksi dengan teknologi tersebut. Bagaimana teknologi ini sebagai alat, dapat mencapai pemenuhan fungsinya sebagaimana tujuan inovasinya tergantung ke mana dan bagaimana alat ini diberdayakan oleh pustakawan yang berdaya dan atau juga diberdayakan untuk mengelola alat ini bersama-sama dan dengan segenap aset lainnya yang melekat di dalam entitas sistem sosial perpustakaan. Oleh karena itu kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) menjadi sub-fokus yang dikaji.

Kapasitas kelembagaan dapat memengaruhi kinerja organisasi dan oleh karenanya berpotensi untuk mewujudkan perubahan sosial. Kerangka pikir seperti diuraikan di atas telah menuntun peneliti kepada konsep Teori AST yang diharapkan dapat memandu peneliti didalam upaya memahami fenomena yang diteliti. Teori AST yang diadopsi oleh DeSanctis & Poole (1994) dari teori strukturasi-nya Giddens dianggap cocok untuk digunakan dalam menganalisis. Berlandaskan kepada teori AST dipahami bahwa teknologi perpustakaan digital adalah suatu struktur. Demikian pula halnya dengan INHERENT. AST digunakan secara khusus dalam mengkaji beragam dikotomi fenomena yang muncul dari interaksi perorangan dan organisasi dengan TIK yang mungkin akan ditemui pada obyek penelitian, seperti misalnya: stabilitas atau perubahan kelompok, pilihan bebas atau determinasi yang didasarkan pada struktur sosial. Sementara itu teori

Universitas Indonesia

strukturasi memungkinkan pemilahan aras analisis, yakni antara aras mikro, meso, dan makro sebab strukturasi ini beroperasi baik pada aras individual, kelompok, maupun sistem sosial seperti organisasi dan masyarakat (Orlikowski & Robey 1991, p.148).

Atas dasar paparan pemikiran di atas, maka disajikan diagram kerangka pemikiran untuk penelitian ini seperti pada Gambar 1. Model kerangka pemikiran.



Gambar 1.1. Model kerangka pemikiran

Keterangan:

Lingkungan eksternal 1: Organisasi makro, lembaga induk yang menaungi perpustakaan digital
 Lingkungan eksternal 2: Pemangku kepentingan yang lain dan atau lingkungan sosial perpustakaan digital

1.7. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasannya adalah pada fokus yang diteliti. Kajian ini difokuskan pada dimensi sosial dan bukan dimensi teknologi perpustakaan digital.

Kapasitas kelembagaan merupakan sub-fokusnya, yakni: sumberdaya manusia dan teknologi perpustakaan digital yang tersedia didalam organisasi bersama-sama dengan kapasitas manajemen. Sumberdaya dasar lainnya di dalam

setiap organisasi, yaitu pembiayaan tidak secara khusus menjadi kajian penelitian ini.

1.8. Konsep Operasional

Untuk menghindari kerancuan pemahaman konsep yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi, maka perlu ditetapkan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah dimaksud, yaitu:

- a. **Akses informasi** adalah adanya konektivitas, *content* dan layanan informasi, serta kebergunaan informasi.
- b. **Apropriasi** adalah suatu tindakan yang kasat mata dalam cara menggunakan teknologi.
- c. **Jaringan kerjasama** adalah kerjasama diantara sekelompok perpustakaan yang saling berhubungan untuk membentuk suatu sistem terpadu agar dapat saling berkomunikasi serta berbagi sumberdaya, terutama koleksi, dan juga tercapainya sejumlah tujuan bersama tertentu lainnya.
- d. **Kapasitas perpustakaan digital** adalah potensi kemampuan pustakawan (pada aras mikro), ataupun lembaganya, dalam hal ini perpustakaan digital (pada aras meso) untuk bekerja bersama-sama, memobilisasi segenap sumberdaya dalam memecahkan masalah sehingga mencapai kinerja potensial perpustakaan digital.
- e. **Pelaku** adalah agen manusia (*subject*) pada perpustakaan digital, pustakawan khususnya dan bukan *end-user*.
- f. **Peluang struktur** adalah konteks institusional di mana pustakawan melakukan kegiatannya yang memengaruhi kecakapannya untuk menransformasi agensi menjadi tindakan.
- g. **Perpustakaan digital**, suatu organisasi perpustakaan yang menyediakan berbagai sumberdaya dan mengimplementasikan TIK yang mengintegrasikan kemampuan mencipta, mencari serta menggunakan informasi dalam beragam format agar dapat dipakai bersama oleh komunitas pengguna siapa pun, dari mana pun, ke mana pun, dan kapan pun. Termasuk di dalam batasan ini adalah perpustakaan hibrida yang sebagian koleksinya juga dapat diakses secara fisik.

Universitas Indonesia

- h. **Struktur**, skemata yang tampil dalam praktek-praktek sosial, mirip dengan ‘pedoman’ atau ‘aturan’ yang menjadi prinsip praktek sosial di berbagai tempat dan waktu, yang merupakan hasil perulangan berbagai tindakan pelaku (Herry-Priyono, 2002, p. 22 – 23).

